

**PERSENGKETAAN PERDAGANGAN ANTARA INDONESIA DAN
AMERIKA SERIKAT DALAM EKSPOR UDANG KE AMERIKA SERIKAT
TAHUN 2010-2013**

M Kharif Rahman

Pazli, S.IP. M.Si

Mkharifrahman@yahoo.com

085274746532

Abstract

This research tries to explain the reason of dispute between Indonesia and United States of America. Indonesia is the country's largest shrimp exporter to the United States. The dispute began on charges filed by the Coalition of Gulf Shrimp Industries (COGSI) to the Indonesian government because they feel there has been an unfair trade related influx of U.S. shrimp imports cheaper than U.S domestic shrimp. The Indonesian government has been accused of giving subsidies to exporters to suppress the price of shrimp is marketed to the U.S. Disputes that have happened to be disrupted for trade between the two countries, especially shrimp exports to the United States.

This study used a theory of justice by Adam Smith. This theory is intended to protect from the loss ("the end of justice is to secure from injure") caused by unfair trade in international trade. In addition, the U.S. and Indonesia feel there has been an unfair trade, so that the application of fair trade should be applied in order to avoid trade disputes. The scope of this study is from 2010-2013.

Keywords: *Disputes, Unfair Trade, Export, Import, COGSI, and Shrimp*

Latar Belakang

Penelitian ini akan menganalisa tentang persengketaan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan negara produsen terbesar di dunia. Sektor jasa memberikan kontribusi terhadap GDP (*Gross domestic product*) AS sebesar 76,9%, sedangkan sektor industri dan pertanian masing-masing memberikan kontribusi sebesar 21,9% dan 1,2%.¹ Selain menjadi negara produsen terbesar di dunia, AS juga merupakan negara konsumen terbesar di dunia dengan nilai sebesar \$11,2 triliun pada tahun 2012. Bagi Indonesia, AS merupakan salah satu mitra dagang strategis dimana AS merupakan negara yang menjadi negara tujuan ekspor non migas Indonesia terbesar ketiga setelah China dan Jepang. Indonesia berada dalam urutan keempat sebagai negara sumber impor komoditas laut AS dengan pangsa 7.13 dan nilai impor sebesar 901 juta USD pada tahun 2012.²

AS dan Indonesia memiliki kerangka kerjasama pertemuan dalam *Trade and Investment Framework Agreement* (TIFA) untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi kedua negara. TIFA yang terdiri dari 4 (empat) kelompok kerja: *Intellectual Property Rights, Agricultural and Industrial Goods, Services and Investment*. AS dan Indonesia juga telah membentuk "*Comprehensive Partnership*" pada tahun 2010. Kemitraan strategis ini merupakan komitmen bersama kedua negara. Kemitraan ini diantaranya ditujukan untuk lebih meningkatkan kerjasama ekonomi dalam mendorong perdagangan dan investasi.³

Produksi udang adalah salah satu jenis produksi non-migas yang diunggulkan di Indonesia. Jenis-jenis udang yang dihasilkan oleh Indonesia adalah udang putih (*Banana Prawn, Penaeus merguensis, penaeus indicus*), udang dodol (*Metapenaeus*

1 ITPC, 2013, *Market Intelligence*, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Hal. 16

2 *Ibid*

3 ITPC, *Ibid*. Hal 9

Shrimps, Metapeneus spp), dan udang windu (*Giant tiger prawn, Penaeus monodon, penaeus semisulcatus*). Udang jenis lain yang diproduksi dan konsumsi di dalam negeri dengan jumlah yang cukup besar adalah udang rebon dan udang pasir. Jenis udang yang diekspor ke AS adalah jenis udang vanamme dan dipasarkan dalam bentuk udang beku (*frozen shrimp*). Ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat tentu tidaklah mudah karena adanya permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Pada tahun 2012 Indonesia dan AS mengalami persengketaan perdagangan udang Indonesia ke AS, yaitu berbentuk tudingan bahwa Indonesia telah memberikan subsidi terhadap udang beku yang diekspor ke Amerika Serikat sehingga membuat produk udang Indonesia lebih murah dibandingkan udang domestik AS. Harga udang Indonesia berkisar pada Rp. 25 ribu per kilo sedangkan udang domestik AS berkisar pada 8 US\$.⁴ Pihak AS merasa tidak mendapatkan keadilan dalam perdagangan udang tersebut karena bisa mengancam industri udang domestiknya. Pihak yang melakukan protes tersebut ialah para produsen udang domestik AS yang tergabung dalam *Coalition of Gulf Shrimp Industries* (COGSI), COGSI adalah asosiasi produsen udang domestik di AS yang membentuk suatu koalisi yang mewakili industri di seluruh negara pesisir Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina dan Texas⁵.

COGSI dibentuk khusus untuk memberikan petisi yang diajukan ke pemerintah AS, yaitu *US-International Trade Commission* (US-ITC) dan *US Department of Commerce* (US-DOC) untuk melakukan investigasi pengenaan *Countervailing Duties* (CVD) atas impor *Frozen Warmwater Shrimp* (Udang jenis air hangat beku) pada tanggal 28 Desember 2012⁶. Investigasi pengenaan CVD atas suatu produk ekspor yang di subsidi adalah suatu hal yang bisa dilakukan setiap negara-negara anggota WTO (*World Trade Organization*) karena peraturan mengenai subsidi sudah diatur

4 "Harga udang di Amerika Serikat membubung tinggi mencapai rekor".(<http://vovworld.vn/id-id/Berita/Harga-udang-di-Amerika-Serikat-membubung-tinggi-mencapai-rekor/174397.vov>) . Diakses pada tanggal 7 Oktober 2013 pukul 08.30 WIB

5Coalition of Gulf Shrim Industries, terdapat pada (<http://www.gulfshrimpcoalition.com/>), diakses pada tanggal 7 Oktober 2013 pukul 08.40 WIB

6 Dwi Murdaningsih. "Lagi, AS 'Tuduh' Indonesia tak Adil Soal Ekspor". (<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis-global/13/01/15/mgnqhu-lagi-as-tuduh-indonesia-tak-adil-soal-ekspor>). Diakses pada tanggal 7 Oktober 2013 pukul 09.00 WIB

oleh WTO untuk menghindari kerugian terhadap industri dalam negeri.⁷Tuduhan pengenaan CVD yang dilakukan dimaksudkan untuk mengganti kerugian akibat adanya subsidi dari pemerintah Indonesia. Jika terbukti mendapatkan subsidi maka sanksinya adalah bea masuk imbalan.

Namun dari segala tuduhan tersebut, pihak Indonesia memiliki pembelaan atas tuduhan tersebut karena tuduhan tersebut memberatkan Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan suatu upaya agar dapat lepas dari sanksi yang ditujukan kepada Indonesia. Potensi Indonesia untuk meraih pangsa yang lebih besar juga dapat terlihat dari situasi pemasok lokal komoditas laut di AS. *National Oceanic and Atmospheric Administration* (NOAA) melaporkan bahwa 21.4% dari seluruh lokasi penangkapan ikan telah melewati batasan *overfishing*. Oleh karenanya, beberapa pemerintah negara bagian AS telah memutuskan untuk memberi batasan serta larangan untuk menangkap ikan di beberapa lokasi penangkapan komersil. Hal ini menunjukkan bahwa AS perlu mendapatkan bantuan untuk memasok komoditas laut dengan cara alternatif seperti *farming* atau dengan menaikkan impor.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan persoalan yang telah diuraikan di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah **“Faktor apa yang menyebabkan persengketaan terjadi antara Indonesia dan Amerika Serikat?”**

Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan yang lebih luas kepada masyarakat maupun mahasiswa ilmu hubungan internasional, mengenai persengketaan perdagangan antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam ekspor udang ke Amerika Serikat tahun 2010-2013.

Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan (*justice*). Penggagas teori ini adalah Adam Smith (1723-1790) yaitu seorang guru besar dibidang filosofi moral dari Glasgow University tahun 1750, dikenal sebagai ahli teori

7 Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, 2013. “Keberhasilan Diplomasi Perdagangan RI: Indonesia Buktikan Tuduhan Subsidi Udang Indonesia Tidak Berdasar, Akses Pasar produk Udang RI ke AS Tidak Terganggu”.

hukum dan bapak ekonomi modern.⁸ Teori keadilan ini ditujukan untuk melindungi dari kerugian “*the end of justice is to secure from injure*” yang berawal dari perspektif kapitalisme klasik terhadap perdagangan bebas internasional yang didasarkan pada prinsip *laissez faire* dalam karyanya yang sangat terkenal *An Inquiry to the Nature and Causes of the Wealth Nation*. Prinsip keadilan menurut Smith adalah menekankan aturan *no harm, no intervention*, dan prinsip keadilan tukar.⁹

Hipotesa

Berdasarkan pada rumusan masalah dan kerangka teori yang telah penulis paparkan maka hipotesanya adalah “Persengketaan perdagangan yang terjadi antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam ekspor udang Indonesia ke pasar Amerika Serikat disebabkan oleh ketidakadilan yang dirasakan kedua negara dalam perdagangan udang.” variabel dependennya adalah “ketidakadilan yang dirasakan kedua negara dalam perdagangan udang”, dengan indikator :

1. Produk ekspor udang Indonesia lebih murah dibandingkan udang domestik AS.
2. Kelompok produsen udang domestik AS (COGSI) dan pemerintah AS mengindikasikan bahwa Indonesia telah melakukan teknik perdagangan tidak adil (*unfair trade*) dengan menerapkan subsidi bagi produksi komoditas udang
3. Substansi tuduhan yang memberatkan Indonesia.

variabel independennya adalah “persengketaan perdagangan yang terjadi antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam ekspor udang Indonesia ke pasar Amerika Serikat”, dengan indikator :

1. Tuduhan pemberian subsidi terhadap produk ekspor udang Indonesia.
2. Pembelaan yang dilakukan Indonesia terhadap produk ekspor udang.
3. Proteksi yang dilakukan oleh pemerintah Amerika Serikat agar produksi udang domestiknya aman.

Persengketaan Perdagangan Antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam Ekspor Udang ke Amerika Serikat

8 Bismar Nasution, Diktat Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, (Medan: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, 2005), hal. 4. Lihat juga Neil MacCornick, Adam Smith On Law, Valparaiso University Law Review, (vol. 15, 1981), hal. 244.

9 Keraf, A.S. 1995. Keadilan, Pasar Bebas, dan Peran Pemerintah. *Prisma*, 9, Hal 3-19

Banyaknya produk impor komoditas udang dari berbagai negara yang masuk ke Amerika Serikat ternyata membuat pengusaha dan para nelayan disana yang tergabung dalam *Coalition of Gulf Shrimp Industries/COGSI* tidak bisa berkompetisi dalam bersaing dengan produk impor udang AS karena dijual dengan harga yang lebih murah. COGSI adalah sebuah koalisi yang dibentuk khusus untuk memberikan petisi kepada pemerintah AS yaitu US-DOC dan US-ITC untuk mengenakan *Countervailing Duty* terhadap negara-negara yang terindikasi diberi subsidi oleh masing-masing pemerintah. Direktur Eksekutif dari COGSI ini adalah David Veal dan yang menjadi penasihat hukum (*legal Counsel*) adalah Edward Hayes. COGSI ini diwakili oleh industri-industri yang tersebar di negara bagian pesisir AS yaitu, Alabama, Florida, Georgia, Louisiana, Mississippi, North Carolina dan Texas. Para pengusaha dan nelayan itu menuding bahwa sebanyak tujuh negara melakukan teknik perdagangan tidak adil (*unfair trade*) dengan menerapkan subsidi bagi produksi komoditas udang di negara masing-masing. COGSI akhirnya mengajukan petisi kepada pemerintah AS pada tanggal 28 Desember 2012 untuk mengenakan *Countervailing Duties* (CVD) atas impor *Frozen Warmwater Shrimp* yang dianggap mengandung subsidi dari tujuh negara yaitu China, Ekuador, India, Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

Petisi yang diajukan oleh para pengusaha dan nelayan udang yang tergabung kedalam koalisi (COGSI) diperiksa kelayakannya oleh otoritas AS yaitu Komisi Perdagangan Internasional AS (US-ITC) dan Departemen Perdagangan AS (US-DOC). Pada tanggal 7 Februari 2013, US-ITC melalui voting menetapkan bahwa terdapat indikasi jika industri domestik AS mengalami kerugian karena impor udang yang disubsidi dari negara-negara tersebut. Sejak bulan Januari, US-ITC memulai investigasi lanjutan (akhir) mengenai kerugian ekonomi yang dialami industri udang dalam negeri AS.

Pada tanggal 28 desember 2012, koalisi udang di Amerika Serikat yang tergabung dalam *Coalition of Gulf Shrimp Industries* (COGSI) mengeluarkan petisi dan diberikan kepada pemerintah AS yaitu *US- International Trade Comission* (US-ITC) dan *US-Department of Commerce* (US-DOC). Dalam petisi tersebut COGSI mengajukan permintaan agar melakukan penyelidikan *Countervailing Duties* (CVD) terhadap impor produk udang beku (*certain frozen shrimp*) dari 7 (tujuh) negara eksportir, yaitu RRT, India, Vietnam, Malaysia, Thailand, Ekuador dan Indonesia karena terindikasi adanya pemberian subsidi oleh pemerintah masing-masing negara.

Pihak koalisi yang terdiri dari nelayan dan industri udang AS (COGSI) menuding subsidi diberikan melalui pemberian kredit ekspor, asuransi ekspor, insentif pajak dan bea masuk atas barang modal yang digunakan untuk ekspor ke AS, serta pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang modal yang digunakan

untuk ekspor. Untuk pemerintah Indonesia dituduh telah mengalokasikan subsidi pada sektor perikanan sebesar US\$ 3 miliar selama 5 (lima) tahun untuk meningkatkan target produksi udang 18-19 persen per tahun dari 2010 hingga 2014.¹⁰

Yang menjadi isu tuduhan terhadap pemerintah Indonesia dalam penyelidikan anti-subsidi oleh pemerintah AS adalah sebagai berikut:¹¹

1. *Government Provision of Loans to the Indonesian Fishing and Aquaculture Sector;*
2. *Government Provision of Goods and Services Used to Promote the Indonesian Fishing and*
3. *Aquaculture Sector for Less Than Adequate Remuneration (LTAR);*
4. *Government Provision of Electricity to the Indonesian Fishing and Aquaculture Sector for LTAR;*
5. *Government Provision of Land to the Indonesian Fishing and Aquaculture Sector for LTAR;*
6. *Government Provision of Shrimp Breeding Stock and Fry for LTAR;*
7. *Tax Incentives from the Capital Investment Coordinating Board;*
8. *Import Duty and VAT Exemptions in Bonded Zones;*
9. *Government Provision of Grants to the Indonesian Fishing and Aquaculture Sector;*
10. *Government Provision of Grants for the Lampung Shrimp Pond Project;*
11. *Export Financing from the Indonesia Export-Import Bank;*
12. *Export Credit Insurance;*
13. *Export Credit Guarantees;*
14. *Export Ban on Raw Shrimp;*
15. *Debt Forgiveness from the Government of Indonesia; dan*
16. *CP Prima's Uncreditworthiness.*

10 Pingit Aria. "Dino Patti Djalal Bantah Ada Subsidi Ekspor Udang".
(<http://www.tempo.co/read/news/2013/01/15/090454487/Dino-Patti-Djalal-Bantah-Ada-Subsidi-Ekspor-Udang>). Diakses pada tanggal 7 November 2013 pukul 20.00 WIB

11 Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2013, *AS Mulai Penyelidikan Anti Subsidi Produk Certain Frozen Warmwater Shrimp Indonesia*, terdapat pada <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2013/01/30/as-mulai-penyelidikan-anti-subsidi-produk-certain-frozen-warmwater-shrimp-indonesia-id0-1359540093.pdf> diakses pada tanggal 7 November 2013 pukul 20.30 WIB

Pembelaan Pemerintah Indonesia terhadap tuduhan subsidi oleh asosiasi udang domestik di Amerika Serikat

Investigasi yang dilakukan adalah suatu hal yang wajar sebelum melakukan suatu pembuktian, namun yang memberatkan pemerintah Indonesia adalah jika dalam proses investigasi tersebut bisa mempengaruhi ketahanan pangan nasional dan mengatur produksi udang di Indonesia. Dalam menyikapi tuduhan tersebut pemerintah Indonesia melakukan upaya agar terlepas dari tuduhan yang dilayangkan terhadap pemerintah Indonesia. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya tuduhan tersebut berupa subsidi yang diberikan melalui pemberian kredit ekspor, asuransi ekspor, insentif pajak dan bea masuk atas barang modal yang digunakan untuk ekspor ke AS, serta pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang modal yang digunakan untuk ekspor.

Kegiatan budidaya udang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia, seperti yang sudah diketahui bahwa komoditas udang di Indonesia yang berbasis budidaya memiliki jumlah produksi yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan domestik dan Internasional. Melihat hal ini pemerintah Indonesia memiliki target produksi udang melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia (KKP) yaitu sesuai dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya, melalui perikanan tangkap sebesar 5,44 juta ton dan produksi perikanan budidaya sebesar 9,42 juta ton. Hal ini dapat membuktikan bahwa banyaknya udang yang diproduksi oleh Indonesia kebanyakan melalui cara budidaya sehingga menentukan juga harga yang dipasarkan ke AS. Para nelayan dan pengusaha udang di AS tidak paham pemerintah Indonesia memiliki skema pemberdayaan nelayan dan petambak daerah pesisir.

Program yang digawangi Kementerian Kelautan dan Perikanan memang setiap tahun menggelontorkan dana untuk memberdayakan masyarakat yang membudidayakan udang, namun hal memberdayakan itu bertujuan untuk ketahanan pangan nasional bukan untuk hal komersial seperti yang sudah dituduhkan sebelumnya yaitu memberikan subsidi kepada para eksportir. Cara budidaya ini berpengaruh terhadap banyaknya jumlah udang yang dihasilkan pada saat panen tiba dan berpengaruh juga terhadap ekspor udang Indonesia di pasar Internasional. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, saat ini Indonesia memiliki area pertambakan seluas 1,2 juta ha, dengan potensi efektif untuk budidaya udang ± 773 ribu ha. Salah satu bentuk dukungan pemerintah Indonesia disini dalam pembangunan dan menciptakan lapangan kerja adalah membuat program tambak percontohan atau *demfarm* yang telah dilaksanakan pada tahun 2012 di 6 kabupaten di Pantura Jawa Barat dan Banten, selanjutnya pada tahun 2013 di 28 kabupaten yang tersebar di 6 Provinsi antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, NTB, Sumatera Utara, dan Lampung.

Penyelesaian Persengketaan Perdagangan Antara Indonesia dan Amerika Serikat dalam Ekspor Udang ke Amerika Serikat

Sengketa dapat muncul ketika suatu negara menetapkan suatu kebijakan perdagangan tertentu yang bertentangan dengan komitmen di WTO (*World Trade Organization*) atau mengambil kebijakan kemudian merugikan negara lain. Selain negara yang paling dirugikan oleh kebijakan tersebut, negara ketiga yang tertarik pada kasus tersebut dapat mengemukakan keinginannya untuk menjadi pihak ketiga dan mendapatkan hak-hak tertentu selama berlangsungnya proses penyelesaian sengketa. Di dalam WTO penyelesaian sengketa menjadi tanggung jawab Badan Penyelesaian Sengketa (*Dispute Settlement Body/DSB*) yang merupakan penjelmaan dari Dewan Umum (*General Council/GC*).¹² DSB adalah satu-satunya badan yang memiliki otoritas membentuk panel yang terdiri dari para ahli yang bertugas menelaah kasus. DSB dapat juga menerima atau menolak keputusan panel atau keputusan pada tingkat banding.

DSB tersebut memonitor pelaksanaan putusan-putusan dan rekomendasi serta memiliki kekuasaan/wewenang untuk mengesahkan retaliasi jika suatu negara tidak mematuhi suatu putusan. Meskipun banyak prosedur WTO yang mirip dengan proses pengadilan, negara-negara anggota yang bersengketa tetap diharapkan untuk melakukan perundingan dan menyelesaikan masalah mereka sendiri sebelum terbentuknya panel. Oleh karena itu, tahap pertama yang dilakukan adalah konsultasi antar pemerintah yang terlibat dalam suatu kasus sebelum ketahap penyelesaian melalui WTO.

Dalam kasus persengketaan yang terjadi antara Indonesia dan AS, penyelesaian yang dilakukan kedua negara adalah secara bilateral, kasus ini belum sampai ke tahap penyelesaian oleh Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Persengketaan permasalahan subsidi udang ini masih bisa diselesaikan secara bilateral. Dalam aturan subsidi oleh WTO, setiap negara termasuk Indonesia berhak melakukan tuduhan, baik itu subsidi maupun *dumping* dan *safeguard* kepada negara atau perusahaan pengekspor. Namun, pasal XXII dalam *GATT agreement* menghendaki para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui konsultasi secara bilateral. Mereka disyaratkan untuk memberikan 'pertimbangan simpatik' (*'sympathetic consideration'*) terhadap setiap sengketa mengenai segala sesuatu hal yang menyangkut pelaksanaan GATT.¹³

Indonesia terbebas dari tuduhan subsidi

12 Freddy Josep Pelawi, *Penyelesaian Sengketa WTO dan Indonesia*, Ditjen Kpi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, terdapat pada http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/images/Bulletin/buletin%2044.pdf, diakses pada tanggal 23 november 2013 pukul 08.00 WIB

Dari segala tuduhan yang dilayangkan kepada pemerintah Indonesia melalui investigasi yang telah dilakukan dan upaya-upaya diplomasi perdagangan yang dilakukan, akhirnya Indonesia berhasil membuktikan produk udangnya bebas dari tuduhan subsidi tersebut. *U.S. Department of Commerce* (US-DOC) Pada tanggal 13 Agustus 2013 telah mengumumkan hasil *Final Determination* untuk CVD Udang dari tujuh negara (RRT, India, Malaysia, Vietnam, Thailand, Ekuador, dan Indonesia). *Final Determination* yang diumumkan oleh US-DOC tersebut memutuskan hasil negatif *Countervailing Duty* terhadap impor udang asal Indonesia, dimana aturan final *subsidy rate* yang dikenakan adalah dibawah 2% atau *de minimis* terhadap PT. Central Pertiwi Bahari dan PT. *First Marine Seafoods*, masing masing sebesar 0,23% dan 0,27%.¹⁴ Seperti yang sudah diketahui Indonesia adalah Negara yang masuk kedalam Negara berkembang, di dalam WTO Pasal 27.10 *SCM Agreement* menjelaskan investigasi terhadap negara berkembang yang terkena tuduhan subsidi harus dihentikan apabila level keseluruhan dari subsidi tidak melampaui 2%.

*Any countervailing duty investigation of a product originating in a developing country Member shall be terminated as soon as the authorities concerned determine that:*¹⁵

(a) the overall level of subsidies granted upon the product in question does not exceed 2 percent of its value calculated on a per unit basis; or

(b) the volume of the subsidized imports represents less than 4 percent of the total imports of the like product in the importing Member, unless imports from developing country Members whose individual shares of total

13 Huala Adolf, 2005, *Penyelesaian sengketa dagang dalam WTO*, terdapat pada <http://pasca.uma.ac.id/adminpasca/upload/Elib/MHB/1%20HUKUM%20PERDAGANGAN%20INTERNASIONAL%20Prinsip-prinsip%20dan%20Konsepsi%20Dasar.PDF>, diakses pada tanggal 23 november pukul 08.30 WIB

14 Budi Ernanto, 2013. *Indonesia Terbebas dari Tuduhan Subsidi Ekspor Udang AS*. (<http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/08/14/2/174887/Indonesia-Terbebas-dari-Tuduhan-Subsidi-Ekspor-Udang-AS>). Diakses pada tanggal 24 november 2013 pukul 09.00 WIB

15 World Trade Organization, *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement)*, Terdapat pada <http://www.worldtradelaw.net/uragreements/scmagreement.pdf>, diakses pada tanggal 24 november 2013 pukul 09.00 WIB

imports represent less than 4 percent collectively account for more than 9 percent of the total imports of the like product in the importing Member.

Direktur Jenderal Kerja Sama Perdagangan Internasional Kemendag Iman Pambagyo menyampaikan bahwa hasil *final determination* US-DOC merupakan keberhasilan diplomasi perdagangan RI yang secara konsisten melakukan tiga pendekatan yang secara baik dan konsisten dalam penanganan kasus tuduhan CVD sejak 8 (delapan) bulan investigasi, yaitu: pendekatan teknis/substantif, pendekatan politis, dan tekanan diplomatis.¹⁶

Simpulan

Tuduhan pemberian subsidi oleh pihak produsen udang di Amerika Serikat yang tergabung kedalam koalisi yaitu COGSI yang merasa mengalami tindakan *unfair trade* merupakan tindakan yang keliru yang dapat mengganggu perdagangan khususnya komoditas udang diantara AS dan Indonesia dan negara-negara lain yang tertuduh, karena tidak hanya merugikan pihak produsen udang di Indonesia tetapi juga merugikan para konsumen AS yang membutuhkan pasokan udang. Amerika Serikat tidak bisa mencukupi kebutuhan udang dalam negeri jika hanya mengharapkan produksi udang domestik karena tidak bisa mencukupi kebutuhan keseluruhan udang dalam negerinya, oleh karena itu dibutuhkan pasokan udang dari luar negeri. Tindakan investigasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah AS (US-ITC dan US-DOC) juga adalah tindakan kekeliruan yang lainnya karena hal ini akan menyebabkan keragu-raguan oleh pihak produsen udang di Indonesia dalam melakukan ekspor ke pasar AS.

Dari awal tuduhan subsidi yang dilayangkan oleh pihak AS, Pemerintah Indonesia sudah membantah bahwa tuduhan tersebut tidak benar dan tidak adil bagi perdagangan bebas yang sudah ada dan memberatkan pihak Indonesia. Seperti yang sudah diketahui bahwa peran pemerintah Indonesia dalam bidang perikanan khususnya udang adalah bukan memberikan bantuan seperti subsidi yang bertujuan untuk menekan harga udang Indonesia menjadi lebih murah di pasar internasional, tetapi bantuan yang diberikan pemerintah Indonesia adalah untuk memberdayakan para nelayan dan petambak yang ada di Indonesia menjadi lebih sejahtera serta menurunkan angka pengangguran di Indonesia untuk memberantas tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia dengan membuka lapangan kerja di Indonesia.

16 Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, 2013. *Keberhasilan Diplomasi Perdagangan RI: Indonesia Buktikan Tuduhan Subsidi Udang Indonesia Tidak Berdasar, Akses Pasar produk Udang RI ke AS Tidak Terganggu*, terdapat pada (<http://www.embassyofindonesia.org/tradedcindex.htm>), diakses pada tanggal 24 november 2013 pukul 09.30 WIB

Penyelesaian persengketaan yang dilakukan kedua negara belum sampai ke tingkat WTO, tetapi masih dalam penyelesaian di tingkat bilateral yaitu melakukan investigasi terlebih dahulu oleh otoritas AS. Investigasi yang berjalan di Indonesia membuat pemerintah Indonesia berkoordinasi terhadap pihak-pihak yang terkait untuk melakukan diplomasi perdagangan terhadap pemerintah AS. Hasilnya dalam *final determination* pada tanggal 13 agustus 2013 memang membuktikan bahwa *subsidy rate* tersebut memutuskan hasil negatif *Countervailing Duty* terhadap impor udang asal Indonesia, dimana aturan final *subsidy rate* yang dikenakan adalah dibawah 2% atau *de minimis*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bismar Nasution, 2005, Diktat Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, (Medan: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara.

Keraf, A.S. 1995. Keadilan, Pasar Bebas, dan Peran Pemerintah. *Prisma*, 9

Mohtar Mas'ood, 1990. *Ilmu Hubungan Internasional; Disiplin dan Metodologi*, LP3ES. Jakarta

Mahmul Siregar, 2005. *Perdagangan Internasional dan Penanaman Modal : Studi kesiapan Indonesia Dalam Perjanjian Inverstasi Multilateral*. Medan: Universitas Sumatera Utara, Sekolah Pascasarjana.

Zulian Yamit, 2001, Manajemen Kualitas Produk dan Jasa, Yogyakarta: Ekonisia.

Jurnal dan Artikel :

Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2013, *AS Mulai Penyelidikan Anti Subsidi Produk Certain Frozen Warmwater Shrimp Indonesia*, terdapat pada <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2013/01/30/as-mulai-penyelidikan-anti-subsidi-produk-certain-frozen-warmwater-shrimp-indonesia-id0-1359540093.pdf> diakses pada tanggal 7 November 2013

Freddy Josep Pelawi, *Penyelesaian Sengketa WTO dan Indonesia*, Ditjen Kpi Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, terdapat pada http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/images/Bulletin/buletin%2044.pdf, diakses pada tanggal 23 november 2013

Huala Adolf, 2005, *Penyelesaian sengketa dagang dalam WTO*, terdapat pada <http://pasca.uma.ac.id/adminpasca/upload/Elib/MHB/1%20HUKUM%20PERDAGANGAN%20INTERNASIONAL%20Prinsip-prinsip%20dan%20Konsepsi%20Dasar.PDF>, diakses pada tanggal 23 november 2013

ITPC, 2013, *Market Intelligence*, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, 2013. "Keberhasilan Diplomasi Perdagangan RI: Indonesia Buktikan Tuduhan Subsidi Udang Indonesia Tidak Berdasar, Akses Pasar produk Udang RI ke AS Tidak Terganggu".

Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Amerika Serikat, 2013. *Keberhasilan Diplomasi Perdagangan RI: Indonesia Buktikan Tuduhan Subsidi Udang Indonesia Tidak Berdasar, Akses Pasar produk Udang RI ke AS Tidak Terganggu*, terdapat pada (<http://www.embassyofindonesia.org/tradedcindex.htm>), diakses pada tanggal 24 november 2013

Website:

Anonym. 2013. "Harga udang di Amerika Serikat membubung tinggi mencapai rekor". (<http://vovworld.vn/id-id/Berita/Harga-udang-di-Amerika-Serikat-membubung-tinggi-mencapai-rekor/174397.vov>) . Diakses pada tanggal 7 Oktober 2013

Budi Ernanto, 2013. *Indonesia Terbebas dari Tuduhan Subsidi Ekspor Udang AS*. (<http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/08/14/2/174887/Indonesia-Terbebas-dari-Tuduhan-Subsidi-Ekspor-Udang-AS>). Diakses pada tanggal 24 november 2013

Coalition of Gulf Shrim Industries, terdapat pada (<http://www.gulfshrimpcoalition.com/>), diakses pada tanggal 7 Oktober 2013

Dwi Murdaningsih, 2013. "Lagi, AS 'Tuduh' Indonesia tak Adil Soal Ekspor". (<http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/bisnis-global/13/01/15/mgnqhu-lagi-as-tuduh-indonesia-tak-adil-soal-ekspor>). Diakses pada tanggal 7 Oktober 2013

Pingit Aria. "Dino Patti Djalal Bantah Ada Subsidi Ekspor Udang". (<http://www.tempo.co/read/news/2013/01/15/090454487/Dino-Patti-Djalal-Bantah-Ada-Subsidi-Ekspor-Udang>). Diakses pada tanggal 7 November 2013

World Trade Organization, *Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (SCM Agreement)*, Terdapat pada <http://www.worldtradelaw.net/uragreements/scmagreement.pdf>, diakses pada tanggal 24 november 2013